FOREST CULTURE

Revisi UU No. 41 Tahun 1999 Untuk Siapa?

Pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun secara normatif revisi undang-undang adalah bagian dari dinamika legislasi yang wajar, proses ini justru menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil dan pegiat lingkungan.

H.1



Oase Kaki Gunung Argopuro dan Dinamika Perjuangan Petani Hutan

H.14

Refleksi Perubahan Sistem Penghidupan Orang Rimba

H.19

JULI-AGUSTUS
http://latin.or.id/
MAJALAH BERITA TRIWULAN

TENTANG **LATIN**

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) didirikan pada tanggal 05 Oktober 1989 di Bogor. LATIN merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang nirlaba. LATIN didirikan sebagai sebuah dedikasi untuk mempromosikan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang adil dan beradab bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam tersebut khususnya hutan. LATIN menyebutnya sebagai ***Sosial Forestri*** atau yang kini banyak dikenal sebagai sistem pengelolaan hutan 'Perhutanan Sosial'. Kegiatan yang dilakukan oleh LATIN sedapat mungkin menggunakan pendekatan tersebut untuk mencapai tujuan akhir yaitu menjunjung tinggi semangat keadilan dan demokrasi.

- **Mewujudkan kemandirian pada masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan tergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan**
- **Mendukung kemitraan antar pemangku kepentingan dan pemberian akses kepada masyarakat.**
- **Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dalam pengelolaan hutan.**

LATIN telah melakukan *Rapid Assessment* yang berjudul **"KEHUTANAN 2045 ADALAH SOSIAL FORESTRI"** pada Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Kajian wacana dan pemikiran tersebut disusun melalui wawancara dan perbincangan dengan berbagai *stakeholders* mengenai arah dan tantangan Sosial Forestri di Indonesia. Kegiatan yang didukung oleh Ford Foundation ini menghimpun pemikiran dan rekomendasi dari 100 orang pemikir, pakar, dan pegiat dari berbagai unsur: llembaga pemerintah (antara lain KLHK, Kementerian Desa PDTT, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi), akademisi, pelaku usaha, politisi, organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemuda. Dalam *assessment* tersebut, LATIN membayangkan tentang kondisi Sosial Forestri di Indonesia pada tahun 2045 sebagai **Wana Kayana Sembada** yakni hutan yang kaya,rakyat yang makmur, desa yang mandiri dan tangguh.



Generasi Petama LATIN (Arsip LATIN)





Forum diskusi Generasi Petama LATIN (Arsip LATIN)

TENTANG **FOREST CULTURE**

FOREST CULTURE merupakan jenama majalah independen terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan dan gaya hidup. Majalah ini diterbitkan oleh **Lembaga Alam Tropika Indonesia** sejak September 2006. Saat itu Arif Aliadi (almarhum) sebagai *Chief Editor*; Rosita Dewi sebagai *Managing Editor*; I.G.G. Maha Adi, Heru Pramuji, Lis Hendriani sebagai *Senior Editor*; Sri Nuryani sebagai *Research and Distribution*; Nana Rusyana sebagai *Art and Design*; Rudi Novira sebagai *Marketing and Photo Editor*.

FOREST CULTURE merupakan metamorfosa dari Buletin Perdikan yang diterbitkan sebelumnya. Majalah ini setidaknya telah mencetak beberapa edisi sampai pada akhirnya vakum di tahun 2009. LATIN pada tahun 2025 berkeinginan menghidupkan kembali jenama majalah FOREST CULTURE dalam bentuk digital *(E-Magazine).* Harapannya, majalah digital ini dapat dijangkau oleh berbagai pihak di belahan bumi manapun. Tidak melupakan niat awal lahirnya majalah ini: **"mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari"**, FOREST CULTURE kembali muncul ke permukaan media dengan versi digital dan masih dengan semangat serta tujuan yang sama.

Edisi pertama FOREST CULTURE ini kami beri nama ***E-Magazine* FOREST CULTURE Edisi Gerak Baru**. Edisi Gerak Baru sebagai sebuah penanda kebangkitan kembali semangat kolektif untuk menyuarakan praktik-praktik pengelolaan hutan yang adil, lestari, dan berpihak pada pengetahuan serta kearifan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan.

Alamat Redaksi, Marketing, dan Sirkulasi:
Pendopo LATIN, Jl. Sutera no. 1 Rt 02/05 Situgede Bogor Barat,
Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia – 16115
Telp. : 0813 1116 2045
Email : forestculture@gmail.com

DAFTAR **ISI**

TENTANG LATIN ..... **i**

TENTANG FOREST CULTURE ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

SUSUNAN PEMBUAT MAJALAH ..... **v**

EDITORIAL ..... **vi**
Membangun Komuniti Forestri, Membangun Indonesia dari Desa vi

PESAN PEMBACA ..... **x**

OPINI **1**
Revisi UU No. 41 Tahun 1999: Mengapa Masyarakat Adat dan Kelestarian Hutan Terancam 1

TRIVIA **5**
Trivia tentang Hutan 5

COMMUNITY AND CULTURE **10**
Imbal Jasa Lingkungan: Upaya CFES dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Durian Rambun Menjaga Hutan Desa Rio Kemunyang 10
Kebangkitan Sarongge 14

TRAVELOGUE **18**
Wisata Kampung Durian Rengganis Desa Pakis: Oase Kaki Gunung Argopuro dan Dinamika Perjuangan Petani Hutan 18

OVERSEAS **23**
Refleksi Perubahan Sistem Penghidupan Orang Rimba 23

PHOTO ESSAY **25**
Dokumentasi CFES 25
Padasenang: Bertahan di Balik Sejarah Kehutanan 26

REVIEW **31**
Mewujudkan Keadilan dan Kelestarian Perhutanan Sosial sebagai Paradigma Masa Depan Kehutanan Indonesia 31
Misteri Tersembunyi di Balik Peninggalan Kearifan Lokal Perbatasan Pulau Jawa 35

ENSIKLOPEDIA **37**
Kamus Hidup Kehutanan Sosial dan Budaya Hutan 37

ADVERTORIAL **38**
Kanaya Fund: Bukti Nyata Hutan Bisa Pulih Lewat Aksi Bersama 38

SUSUNAN PEMBUAT MAJALAH

Penasihat	: Dwi Rahmad Muhtaman, Tri Nugroho
Penanggung Jawab	: Thomas Oni Veriasa, Febri Sastiviani Putri Cantika
Pemimpin Redaksi	: Annisa Aliviani
Redaktur Pelaksana	: Taufik Saifulloh, Dicka Prawira
Redaktur	: Febri Sastiviani Putri Cantika
Artistik	: Juffen Timur
Keuangan	: Isa Zaenal

EDITORIAL

Membangun Komuniti Forestri, Membangun Indonesia dari Desa



Foto : Aditya Pradana Putra

Pada buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto, dikutip data BPS 2016: "1 dari 3 orang Indonesia bekerja di sektor agrikultur. 40% dari orang Indonesia yang miskin bekerja di sektor ini." Sektor agrikultur ini pastilah sangat penting karena menjadi tumpuan harapan hidup dan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia hingga kini. Tetapi paradoksnya adalah justru pada sektor itulah kemiskinan menumpuk. Sektor yang mestinya mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, justru rakyat mendapatkan kesusahan.

Sejumlah 68 Juta orang indonesia terancam miskin. Sebanyak 26,9% atau 68 juta orang Indonesia hidup kurang dari 50% di atas garis kemiskinan nasional (PPP US$ 1,30). Jika mereka mengalami masalah ekonomi, mereka bisa jatuh miskin dengan mudah (Bank Dunia, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik (2021) terdapat 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan dengan 36,7% berkategori miskin.

Pada bulan Maret 2021, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 anggota keluarga. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga rata-rata sebesar Rp 2.121.637 per rumah tangga miskin per bulan. Sumber daya hutan yang kaya ternyata membuat rakyat di sekitarnya justru miskin. Inilah paradoks Indonesia.

Bahkan dalam buku Paradoks Indonesia itu

Prabowo mengutip data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (2014) bahwa 1% orang Indonesia menguasai 72% tanah di Indonesia. Rasio ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah saat ini: 0.72, artinya 72% tanah dikuasai sekitar 2,5 juta orang saja.

Ketika Prabowo Subianto diberi mandat rakyat untuk menjadi Presiden (2024-2029), Ia menyatakan dalam visi misinya, sistem ekonomi yang dianut adalah Paham Ekonomi Pancasila. Menurutnya, Ekonomi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Ekonomi yang religius dan Wujudkan persatuan nasional**
- **Ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan**
- **Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional**
- **Ekonomi yang egaliter (sederajat) dan kerakyatan**
- **Ekonomi yang berkeadilan sosial**

Menganut Ekonomi Pancasila adalah sebuah eksperimen yang menarik untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang diuraikan pada Paradoks Indonesia. Nampaknya Prabowo percaya sistem Ekonomi Pancasila adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan sejumlah kekotoran dan kerusakan yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang menguasai hajat hidup orang banyak saat ini.

Dalam kerangka Sistem Ekonomi Pancasila itulah Prabowo meletakkan salah satu misi pentingnya: **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**



Foto : LATIN/Annisa Aliviani

Apa yang bisa disumbangkan oleh gerakan komuniti forestri untuk membangun dari desa, meningkatkan ekonomi rakyat dan membuat rakyat desa sejahtera?

Pakar agroekologi dari Inggris, Mulvany (2010) menyatakan bahwa masyarakat kecil tradisional sejak dahulu telah memiliki kedaulatan pangan, karena mereka bertani secara agroekologi dengan *low external input production.* Praktek produksi yang seperti inilah yang mampu membebaskan petani dari ketergantungan dengan beragam input produksi yang mencekik.

Komuniti forestri membangun ekonomi berdasarkan kekmampuan untuk mengelola sumeber daya alam yang tersedia di wilayah petani tinggal dan hidup. Karena wilayah itu adalah ruang hidup yang dikenal dengan baik.

Menurut Celeste Lacuna-Richman dalam buku G*rowing from Seed An Introduction to Social Forestry* (2012), kehutanan sosial, termasuk variannya yang paling dikenal yaitu kehutanan masyarakat, telah dipraktikkan hampir sepanjang sejarah manusia memanfaatkan hutan. Hutan menyediakan beragam barang dan jasa, seperti kayu, obat-obatan, makanan, air bersih, dan rekreasi. Dalam memanfaatkan sumber daya hutan, manusia sering kali mengorganisir diri mereka dan menetapkan aturan, baik formal maupun informal. Dengan kata lain semua kehutanan adalah komuniti forestri. Karena dimanapun hutan berada hampir dipastikan ada jejak komunitas di dalamnya. Pengakuan peran penting masyarakat dalam pengelolaan hutan tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk Perhutanan Sosial. Meskipun pengakuan dan dukungan pengelolaannya masih jauh dari harapan.

Hingga saat ini luas Perhutanan Sosial mencapai **8.102.590** Ha. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sejumlah **14.737** KUPS dengan Nilai Ekonomi Nasional yang diperoleh mencapai **1.398,60** Milyar. Ini hanya dari wilayah perhutanan sosial, yakni hutan yang berada di dalam kawasan hutan negara yang dikelola masyarakat. Pada tahun 2014 pemerintah mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial. Tetapi di luar kawasan hutan negara masih terdapat jutaan hutan yang dikelola sebagai hak milik oleh masyarakat.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2014 hutan rakyat di Indonesia mencapai 34,8 juta. Pulau Jawa seluas 2,7 juta hektare dengan potensi kayu 78,7 juta meter kubik, sedangkan di luar Pulau Jawa luasnya sebesar 32,1 juta hektare dengan potensi 912 juta meter kubik.

Hutan rakyat memasok 46,9% dari kebutuhan kayu log nasional, terutama untuk jenis kayu sengon, mahoni, jati, jabon, sonokeling yang umum tumbuh di Jawa. Pada tahun 1993, jumlah rumah tangga yang mengelola hutan rakyat mencapai 827.767. 83,5% berada di pulau Jawa.

Luas hutan rakyat juga bertambah. Menurut data Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Jawa -Madura, pada 1993 luas hutan rakyat 1,9 juta hektare naik menjadi 2,7 juta hektare pada tahun 2009, dengan taksiran volume kayu sebanyak 74 juta meter kubik. Hutan rakyat di luar kawasan inilah yang juga perlu mendapatkan perhatian karena keberadaannya makin terancam oleh ekspansi sektor-sektor yang memerlukan lahan makin luas. Komuniti forestri, pengelolaan hutan rakyat dalam ekosistem ekonomi lokal, baik hutan dalam maupun di luar kawasan hutan, menjadi sumber kehidupan lebih dari 25.000 desa. Maka sangat relevan jika pemerintahan saat ini memberi perhatian yang sungguh-sungguh di desa-desa sekitar hutan dengan mendorong program komuniti forestri yang lebih luas. Dan ini sesuai juga dengan program prioritas Kementrian Kehutanan: Penguasaan Hutan yang Berkeadilan. Penguasaan hutan yang berkeadilan berarti memberi ruang hidup yang adil dan memadai bagi rakyat yang menggantungkan hidupnya pada hutan.

Program komuniti forestri (perluasan dari Perhutanan Sosial) memiliki potensi besar untuk membantu mengurangi kemiskinan relatif di Indonesia melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, diversifikasi sumber penghidupan, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan

wilayah. Ekosistem kehutanan di desa-desa harus dibangun. Ini adalah program jangka panjang. Membangun dan mengelola komuniti forestri adalah visi jangka panjang. Meskipun program ini tidak langsung menargetkan kemiskinan ekstrem, dampak jangka panjangnya akan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia.

Melalui komuniti forestri Indonesia membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Situgede, Bogor,
Juni 2025
Dwi Rahmad Muhtaman

PESAN PEMBACA

Bijak di sini belum tentu bijak di sana." Edisi perdana Forest Culture Reborn ini mengangkat tema kebijakan kehutanan di era pemerintahan baru—sebuah pengingat bahwa kebijakan harus selalu mempertimbangkan konteks sosial, ekologis, dan kultural tempat ia diterapkan.

Novan Aji Imron

Pada edisi ini, saya jadi sadar bahwa narasi besar pembangunan ternyata sering mengorbankan hutan. Semoga kedepannya Forest Culture ini tetap konsisten ya untuk menyuarakan perspektif langsung dari akar nya.

Widya Maulida Prikel

OPINI

Revisi UU No. 41 Tahun 1999:

Mengapa Masyarakat Adat dan Kelestarian Hutan Terancam

Oleh:
Lembaga Alam Tropika Indonesia
dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan

Pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun secara normatif revisi undang-undang adalah bagian dari dinamika legislasi yang wajar, proses ini justru menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat sipil dan pegiat lingkungan. Alih-alih memperbaiki tata kelola hutan yang selama ini dinilai belum berpihak pada masyarakat adat dan lokal, arah revisi tampak justru melanggengkan pola-pola lama yang sentralistik, eksklusioner, dan berpotensi memperluas eksploitasi sumber daya alam.



Foto : Arsip LATIN

Hutan di Indonesia adalah ruang hidup bagi jutaan makhluk hidup, termasuk masyarakat adat yang telah menjaga kawasan hutan secara turun-temurun.
Hutan juga merupakan penyangga ekosistem yang menopang ketahanan pangan, sumber air, dan kestabilan iklim. Data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia hingga Desember 2024, luas kawasan hutan mencapai **125.541.298,80** hektar atau sekitar **65,92%** daratan Indonesia, dengan luasan ini kebijakan kehutanan memiliki implikasi langsung terhadap keadilan sosial, krisis iklim, dan ketahanan ekologis bangsa ini.

Namun dalam praktiknya, arah kebijakankehutanan selama ini cenderung berpihak pada kepentingan industri skala besar. Ketimpangan penguasaan kawasan hutan masih sangat tinggi. Program Perhutanan Sosial dan pengakuan hutan adat belum berjalan semestinya, sementara konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan konsesi terus berlangsung. Revisi UU Kehutanan, dalam konteks ini, menjadi ujian penting. Apakah negara sungguh-sungguh memperbaiki ketimpangan dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas, atau justru memperkuat dominasi negara dan korporasi atas sumber daya hutan.

Diskusi lintas organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang diselengarakan pada 16 Mei 2025 di Bogor, merangkum sejumlah persoalan krusial dalam revisi UU Kehutanan ini. Salah satu yang paling menonjol adalah kecenderungan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat atas kawasan hutan. Sentralisasi ini bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan pengakuan hak kelola masyarakat yang telah diperjuangkan sejak awal era reformasi sebagaimana diulas dalam kajian Wollenberg dan Kartodihardjo pada 2002 mengenai devolusi pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam praktiknya, pendekatan *top-down* semacam ini menciptakan jurang antara kebijakan dan kenyataan di lapangan, serta menutup ruang partisipasi lokal yang esensial dalam menjaga keberlanjutan hutan. Lembaga-lembaga seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kerap kehilangan kejelasan mandat di tengah tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, sebagaimana dicatat dalam *Roadmap* Pengelolaan KPH 2020–2030 yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020.

Padahal, berbagai studi termasuk riset Porter-Bolland dan kolega pada 2012 dalam *Forest Ecology and Management* telah menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat lebih efektif dalam menekan deforestasi dan mempertahankan fungsi ekologis hutan. Namun arah revisi UU ini justru mengabaikan potensi tersebut. Ia dikhawatirkan menjadi instrumen legalisasi praktik-praktik alih fungsi hutan yang selama ini bermasalah. Proyek strategis nasional seperti *food estate*, ekspansi perkebunan sawit, dan eksploitasi tambang di kawasan hutan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Laporan Auriga Nusantara tahun 2022 menunjukkan bahwa proyek-proyek ini kerap mengabaikan fungsi ekologis dan menimbulkan konflik tenurial yang serius. Alih-alih memperbaiki tata kelola dan menegakkan hukum lingkungan, revisi ini justru berisiko memperkuat status quo yang selama ini merugikan masyarakat dan lingkungan.

Kekhawatiran ini diperparah oleh terbatasnya akses terhadap informasi penting, seperti izin usaha, rencana kerja tahunan, dan data tutupan hutan. Menurut laporan tahunan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) tahun 2023, rendahnya transparansi dalam sektor kehutanan menghambat pengawasan publik dan membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif serta eksploitatif.

Pasal 67 dalam UU Kehutanan yang ada saat ini, yang seharusnya menjadi landasan perlindungan hak-hak masyarakat adat, belum mampu menjawab tantangan di lapangan. Kajian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Epistema Institute tahun 2021 menunjukkan bahwa proses pengakuan hutan adat masih memberatkan komunitas karena bertumpu pada beban pembuktian administratif. Dalam kerangka hak asasi manusia, seperti ditegaskan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tahun 2007, pengakuan atas wilayah adat seharusnya melekat dan tidak bersifat kondisional. Dalam kenyataan sosial, masyarakat adat telah menjaga kawasan hutan secara turun-temurun tanpa insentif negara. Sayangnya, mereka justru sering kali berada dalam posisi rentan terhadap penggusuran,

kriminalisasi, dan stigma sebagai perambah. Revisi UU Kehutanan belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap perlindungan hak-hak ini.

Jika tujuan revisi adalah memperbaiki tata kelola hutan secara menyeluruh, maka semestinya pemerintah menempatkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekologis sebagai fondasi utama. Penguatan program Perhutanan Sosial dan integrasi dengan agenda reforma agraria perlu dijadikan strategi struktural, bukan sekadar program sektoral jangka pendek. Pendekatan integratif ini telah banyak dikaji, salah satunya oleh Rifai dan kolega dalam riset yang diterbitkan oleh Sajogyo Institute pada 2020. Selain itu, indikator kemakmuran rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010 yang mencakup partisipasi rakyat, kemanfaatan sumber daya alam, serta penghormatan terhadap hak harus menjadi rujukan utama dalam penentuan arah kebijakan kehutanan. Revisi juga perlu dilandasi oleh kajian kelembagaan yang komprehensif, bukan sekadar restrukturisasi birokrasi yang bersifat politis dan reaktif.

Hutan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat yang bergantung padanya. Ia bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang spiritual, identitas kultural, dan penyangga keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, proses revisi undang-undang ini harus berlangsung secara terbuka dan melibatkan masyarakat sipil. Tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat sipil, revisi ini hanya akan menjadi instrumen hukum bagi ketimpangan baru yang membungkam suara masyarakat dan memperkuat dominasi ekonomi atas alam.

KITA PATUT BERTANYA:

REVISI INI UNTUK SIAPA?



Foto : Afriadi Hikmal

Sumber:

1. "Info Statistik" *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*. https://kehutanan.go.id/. Diakses pada 20 Mei 2025.
2. Wollenberg, E., & Kartodihardjo, H. (2002). *Devolution and Indonesia's Forests: The Effect of Localizing Authority*. CIFOR.
3. Ministry of Environment and Forestry (2020). *Roadmap Pengelolaan KPH 2020–2030.*
4. Porter-Bolland, L., et al. (2012). *Community managed forests and forest protected areas: An assessment of their conservation effectiveness across the tropics*. Forest Ecology and Management, 268, 6–17.
5. Auriga Nusantara (2022). *Food Estate dan Risiko Pengabaian Fungsi Ekologis Hutan.*
6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). (2023). *Laporan Tahunan Transparansi Sektor Kehutanan.*
7. AMAN & Epistema Institute (2021). *Kajian Pengakuan Wilayah Adat dan Tantangan Administrasi Negara.*
8. UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), Articles 10–26.
9. Rifai, H., et al. (2020). *Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Menuju Integrasi dan Transformasi Struktural*. Sajogyo Institute.
10. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010.

TRIVIA

Trivia tentang Hutan

Oleh : Naily Fitrotun dan Annisa Firjatulloh

TEMUKAN 15 KATA TENTANG SOSIAL FORESTRI

A	D	I	L	J	K	M	K	H	D	P	K	S
X	S	E	G	A	L	P	O	G	P	A	G	W
U	D	F	S	W	S	O	P	A	E	N	J	Q
R	A	K	Y	A	T	H	I	S	T	G	Y	U
W	I	T	V	D	R	O	G	D	A	A	T	U
X	R	H	U	T	A	N	Z	U	N	N	R	I
M	A	N	D	I	R	I	S	L	I	K	S	J

FUN FACT

1. **Pohon "Berteman" di Dalam Hutan**
   Melalui jaringan akar bawah tanah yang disambungkan oleh jamur mikoriza, pohon dapat "berkomunikasi" satu sama lain. Pohon tua sering kali berbagi nutrisi dengan pohon muda dan memberi sinyal peringatan jika ada bahaya, seperti serangan hama.

2. **Hutan Menyimpan Jejak Sejarah Bumi**
   Pohon dapat hidup selama ratusan hingga ribuan tahun, seperti pohon Sequoia raksasa dan Pinus *Bristlecone*. Lingkaran tahun pada batangnya menyimpan informasi tentang iklim, bencana alam, dan kondisi lingkungan dari masa lalu.

3. **Makhluk hidup tertinggi di bumi**
   Pohon tertinggi di dunia disebut Hyperion. Yaitu kayu merah dari California yang tingginya mencapai 380 kaki (115,61 meter).

4. **Beberapa pohon pernah ke bulan**
   Pada tahun 1971, misi Apollo 14 NASA membawa benih pohon ke luar angkasa untuk melihat apakah pohon akan berkecambah. Lalu mencari tahu bagaimana perubahan gravitasi mempengaruhi pertumbuhan.



Foto : Freepik.com

5. Hutan yang sehat adalah hutan yang dipenuhi dengan penyakit jamur

Di dalam ekosistem hutan, keberagaman jenis tumbuhan menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan dan ketahanan lingkungan. Di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat dan Kanada, komposisi jenis pohon di hutan cenderung didominasi oleh empat hingga lima spesies saja. Berbeda halnya dengan hutan hujan tropis, di mana dalam area seluas lapangan baseball saja dapat ditemukan lebih dari 166 jenis pohon yang berbeda. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menjaga tingginya keanekaragaman hayati di hutan tropis adalah keberadaan penyakit jamur. Hal ini diunkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Erin Spear di Smithsonian Tropical Research Institute. Penyakit jamur secara alami berfungsi mengendalikan populasi masing-masing spesies pohon, khususnya pohon-pohon yang cenderung mendominasi area tertentu. Dengan adanya pengendalian alami ini, spesies pohon yang lebih kuat tidak akan terlalu menguasai area hutan, sehingga memberikan ruang bagi spesies lain untuk tumbuh dan bertahan. Keanekaragaman spesies dalam hutan sangat penting karena membuat ekosistem lebih tangguh menghadapi berbagai tekanan lingkungan, seperti perubahan iklim atau serangan hama.Bila suatu spesies mengalami gangguan, spesies lainnya masih dapat mempertahankan fungsi ekosistem secara keseluruhan.

6. Apa yang lebih dulu ada hujan atau hutan hujan?

Hutan hujan begitu lebat; butiran hujan bisa membutuhkan waktu sepuluh menit untuk jatuh dari kanopi hingga ke lantai hutan. Hutan hujan sangat lebat dengan flora dan fauna—sebidang hutan seluas 10 kilometer persegi (4 mil persegi) dapat dipenuhi dengan hingga 1.500 spesies tumbuhan berbunga, 750 spesies pohon, 400 spesies burung, dan 150 spesies kupu-kupu.



Foto : Freepik.com

7. **Lemari obat alam**
Lebih dari enam puluh persen obat antikanker berasal dari sumber alami, termasuk tumbuhan hutan hujan. Tumbuhan hutan hujan digunakan dalam beberapa obat penyelamat nyawa paling penting di dunia. Namun, harta karun medis ini terancam oleh deforestasi dan perubahan iklim. Ini berarti tumbuhan hutan hujan yang mengandung unsur-unsur potensi pengobatan baru hilang sebelum sempat ditemukan.

8. **Hampir 1,6 miliar orang—lebih dari dua puluh lima persen populasi dunia—bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka**
Hutan bukan hanya sekadar kawasan yang dipenuhi pepohonan, tetapi juga sumber kehidupan bagi miliaran manusia di seluruh dunia. Data menunjukkan bahwa hampir 1,6 miliar orang, atau lebih dari 25% populasi dunia, menggantungkan hidupnya secara langsung pada sumber daya hutan. Ketergantungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan dasar hingga sumber penghidupan ekonomi.

Beberapa contoh ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan antara lain:

- Pangan: Banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan sekitar hutan, memperoleh bahan pangan seperti buah-buahan, umbi-umbian, madu, dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) lain dari hutan.
- Air: Hutan berperan sebagai daerah tangkapan air yang menyediakan sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian.
- Obat-obatan tradisional: Beragam spesies tumbuhan di hutan dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional oleh komunitas lokal.
- Kayu dan bahan bangunan: Kayu dari hutan digunakan untuk keperluan perumahan, perabotan, hingga bahan bakar.
- Mata pencaharian: Banyak masyarakat yang bekerja di sektor kehutanan, mulai dari pengelolaan hasil hutan kayu dan non-kayu, ekowisata, hingga jasa lingkungan.
- Budaya dan spiritual: Bagi sejumlah komunitas adat, hutan memiliki nilai budaya, sejarah, dan spiritual yang tinggi. Hutan sering dianggap sebagai ruang sakral dan warisan leluhur yang harus dijaga. Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama di egara-negara berkembang yang memiliki kawasan hutan luas, seperti Indonesia, Brasil, dan beberapa negara di Afrika. Jika hutan rusak atau hilang, maka jutaan orang akan kehilangan sumber penghidupan dan kesejahteraannya terancam

9. **Hutan membutuhkan api**
Kebakaran hutan dapat menyebabkan kerusakan parah dan merusak properti serta
lingkungan. Namun, tahukah Anda bahwa api juga sangat penting untuk regenerasi hutan? Kebakaran kecil melepaskan nutrisi berharga di lantai hutan dan membuka kanopi hutan untuk sinar matahari, yang kemudian merangsang pertumbuhan baru. Salah satu fakta yang kurang diketahui tentang hutan adalah bahwa spesies pohon penting seperti pinus lodgepole dan pinus Banks membutuhkan panas yang intens untuk membuka kerucutnya dan melepaskan bijinya.

10. **Hutan mencegah badai tropis**
Hutan dapat melemahkan dan bahkan mencegah badai tropis. Kanopi pohon yang membentuk hutan membantu memecah angin kencang. Menurut studi baru, reboisasi skala besar di seluruh Eropa dapat mengurangi jumlah siklon ekstratropis hingga 80%.

Sumber:

https://www.rri.co.id/daerah/884888/fakta-fakta-menarik-soal-hutan

https://www.si.edu/stories/five-unexpected-facts-about-forests

https://standfortrees.org/blog/forest-facts/

https://clickatree.com/en/forest-facts/

Imbal Jasa Lingkungan:

Upaya CFES dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Durian Rambun Menjaga Hutan Desa Rio Kemunyang

Oleh : Tim Publikasi CFESS



Kelompok Perempuan KUPS Harapan Baru

Hutan Desa Rio Kemunyang yang terletak di Desa Durian Rambun, Kabupaten Merangin, Jambi, adalah contoh sukses pengelolaan hutan secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal. Ditetapkan sebagai Hutan Desa pada tahun 2011, kawasan ini membentang seluas sekitar 4.484 hektar dan kaya akan kekayaan alam yang luar biasa. Selain berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Hutan Desa Rio Kemunyang juga berperan sebagai penyangga ekosistem penting, menyediakan habitat bagi berbagai spesies langka dan dilindungi, seperti **Trenggiling (Manis javanica)** dan **Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)** yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Pengelolaan Hutan Desa Rio Kemunyang dilakukan oleh Le**mbaga Pengelola Hutan Desa (LPHD**), dengan melibatkan masyarakat setempat yang berjumlah sekitar 552 jiwa (115 KK). Meskipunjumlah penduduk tergolong kecil, masyarakat Desa Durian Rambun telah berhasil mengelola kawasan hutan yang luas ini dengan penuh tanggung jawab. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Keberhasilan pengelolaan Hutan Desa Rio Kemunyang dapat dilihat dari berbagai perubahan yang terjadi dalam aspek **ekologi, ekonomi, dan sosial** desa tersebut. Keberadaan hutan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan yang dikella dengan baik dapat memelihara keanekaragaman hayati, termasuk spesies tanaman dan satwa liar yang dilindungi. LPHD Rio Kemunyang secara rutin melakukan **patroli** dan **monitoring** untuk memantau keberadaan satwa liar, mendata jenis tumbuhan, serta mendeteksi aktivitas ilegal di kawasan hutan dengan menggunakan SMART Patrol.

Kegiatan patroli dan monitoring turut menggunakan **kamera jebak *(Camera trap)*** untuk memperoleh data visual berupa foto dan video satwa liar yang ada di kawasan hutan. Selain itu, masyarakat juga fokus pada rehabilitasi hutan dengan memproduksi bibit tanaman kehutanan dan buah-buahan, serta melakukan penanaman dan pemeliharaan oleh kelompok **HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)**.

Pengawasan melalui ***ground checking*** juga dilakukan untuk memastikan bahwa pembukaan lahan di kawasan hutan desa dilakukan secara legal.

Pengelolaan hutan ini tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membawa manfaat signifikan bagi masyarakat secara ekonomi dan sosial. Salah satunya melalui **usaha perhutanan sosial** yang berkelanjutan, yang meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kelompok usaha yang terorganisir, seperti **Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Harapan Baru**.

Salah satu contoh suksesnya adalah usaha kopi bubuk yang dikelola oleh kelompok perempuan di Desa Durian Rambun sejak tahun 2017. Melalui usaha ini, masyarakat setempat memperoleh pendapatan tambahan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.



Foto : LATIN/Adinda Egreina

CFES dalam Mendukung Keberlanjutan Hutan



Tim Patroli LPHD Rio Kemunyang

Community Forest Ecosystem Services (CFES), memegang peranan penting dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Desa Durian Rambun melalui skema Payment for Ecosystem Services (PES) atau imbal jasa lingkungan. Skema PES ini merupakan apresiasi berupa insentif finansial kepada masyarakat desa yang berhasil menjaga dan memulihkan kondisi lingkungan. Insentif tersebut diberikan berdasarkan pencapaian yang terukur dan kinerja yang baik (performance-based payment).

Selain imbal jasa lingkungan, CFES juga berperan dalam pengutan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. CFES mendukung pengelolaan Hutan Desa Rio Kemunyang dengan mengedepankan prinsip FPIC dan kerjasama multi-stakeholder yang melibatkan masyarakat, LPHD, dan pemerintah.Berbagai program telah dilaksanakan, di antaranya penyegaran kapasitas LPHD dalam pengelolaan skema PES, identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, pelatihan public speaking, pelatihan perspektif gender, pelatihan Bisnis Model Kanvas (BMC), dan pelatihan SMART Patrol. Program-program ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa Durian Rambun khususnya LPHD Rio Kemunyang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, memastikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang, serta berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.

Keberlanjutan Hutan untuk Kesejahteraan Bersama

Keberhasilan pengelolaan Hutan Desa Rio Kemunyang bukan hanya terletak pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tetapi juga pada komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan demi generasi mendatang. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat yang besar, baik untuk lingkungan, ekonomi, maupun sosial.

Hutan Desa Rio Kemunyang menjadi contoh nyata bahwa dengan adanya kerjasama yang erat antara masyarakat, lembaga pengelola hutan, dan berbagai pihak terkait, hutan yang luas dan kaya akan potensi alam ini dapat dikelola secara bijaksana. Hal ini menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pihak, baik dalam aspek pelestarian alam maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari terus dukung komitmen ini, menjaga kelestarian hutan, dan memastikan bahwa keanekaragaman hayati tetap terlindungi untuk masa depan yang lebih baik.

Kebangkitan Sarongge

Oleh: Firman Dwi Yulianto



LATIN/Adinda Egreina

Singkat dari penggarapan lahan Kawasan TNGGPP

Dinginnya udara Kampung Sarongge yang menusuk kaki, menemani perbincangan kami dengan Kang Deni bersama secangkir kopi panas malam itu. Kang Deni merupakan salah satu pengurus Koperasi Sugih Makmur di Kampung Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.
Perbincangan malam itu tidak lain karena ketertarikan kami untuk mendengar dan membayangkan apa saja yang terjadi di Kampung Sarongge kala dulu hingga sekarang, dimana dalam sejarah kampung tersebut, sebanyak 155 masyarakat Kampung Sarongge menggarap lahan di Kawasan TNGGP seluas 38 hektar. Akhirnya, beliuaupun menceritakan kepada kami secara runtut terkait peristiwa-peristiwa penting yang menjadi tolak balik atas sejarah penggarapan lahan di TNGGP tersebut.

Bermula pada tahun 1990-an dimana masyarakat sarongge mulai menggarap lahan yang dulunya masih di bawah naungan Perum Perhutani, namun saat ini telah menjadi bagian TNGGP akibat perluasan wilayah pada tahun 2003. Dalam menggarap dan memanfaatkan lahan tersebut, mereka biasa membuka hutan secara langsung dan sebagian para penggarap membeli kepada penggarap sebelumnya. Pada tahun yang sama, Kawasan TNGGP mengalami perluasan kurang lebih 7.655 hektar yang merupakan kawasan Perum Perhutani. Singkat cerita, beberapa penggarap mulai meninggalkan lahan garapannya pada tahun 2009, setelah TNGGP bekerja sama dengan Green Radio yang pada waktu itu membantu merelokasi para penggarap. Dalam kerja sama tersebut, Green Radio membuat program adopsi pohon dan pembentukan kelompok ternak sebagai bagian untuk membantu merelokasi masyarakat. Hingga pada tahun 2012, kurang dari 50 penggarap dengan keikhlasan mereka meninggalkan lahan garapannya. Hal tersebut bertepatan juga dengan kunjungan Menteri Kehutanan dan pembentukan Koperasi Sugih Makmur. Satu tahun kemudian merupakan



LATIN/Adinda Egreina

titik balik semuanya, dimana semua penggarap berhasil meninggalkan lahan garapannya yang bertepatan dengan kedatangan Presiden waktu itu dan Festival Sarongge I. Hingga pada tahun 2014, kontrak Green Radio dengan TNGGP telah usai dan dilanjutkan dengan Festival Sarongge II dan program adopsi pohon yang terus merambah desa-desa lain di lingkar Sarongge.

Adopsi pohon yang perlu diadopsi dan diteladani

Mengapa konsep adopsi pohon yang telah terjadi dalam sejarah penggarapan lahan di TNGGGP oleh masyarakat Sarongge juga perlu diadopsi bagi daerah-daerah lainnya? Ini merupakan hal menarik dan perlu diteladani, terutama bagi daerah-daerah yang masih memiliki konflik dengan para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan membuka lahan di kawasan hutan milik negera, dimana hal tersebut telah jelas dilarang oleh undang-undang.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam sejarah nenek moyang mereka, sebagian besar mereka telah memanfaatkan hutan dari dahulu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di suatu ketika, saat kami berkunjung ke Sarongge dan mendengar semua cerita dan referensi dari program adopsi pohon tersebut, kami membayangkan "Bagaimana jika program ini diselenggarakan di seluruh penjuru Indonesia?". Pertanyaan tersebut yang hinggap saat itu, dimana melihat hijaunya hutan yang kembali dan masyarakat mendapatkan imbalan atas pemeliharaan atas pohon-pohon yang diamanahkan kepada mereka untuk dijaga.

Menurut kami, adopsi pohon sangat relevan jika diimplementasikan untuk mengentaskan lahan-lahan kritis di Indonesia yang butuh perhatian khusus dari semua pihak. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan telah memikirkan tentang bagaimana menyalurkan program CSR mereka untuk turut serta menyelamatkan bumi, dengan adopsi pohon dimana mereka akan membayar kontribusi dengan besaran tertentu dan kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk menjaga dan merawatnya hingga pohon yang ditanam akan terakumulasi sehingga lahan-lahan kritis menjadi hijau kembali. Namun adopsi pohon tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masih-masing. Pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting dilakukan agar keberhasilan dari adopsi pohon dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat. Langkah awal yang perlu dilakukan ialah mempelajari semua konsep mengenai adopsi pohon tersebut, melakukan studi banding dan kajian kajian untuk menyempurnakan kekurangannya serta untuk menyesuaikan dengan karakteristik dari wilayahnya. Dalam hal ini, peran NGO/LSM lokal yang memiliki semangat yang kuat mengembalikan lahan-lahan kritis mereka sangat dibutuhkan untuk menampung, mengkaji dan mengimplementasikan konsep adopsi pohon tersebut di wilayahnya. Adopsi pohon yang di Sarongge diwadahi oleh salah satu NGO lokal yaitu Green Iniciative Foundation/ GIF (Yayasan Prakarsa Hijau) yang dibentuk dan dibina oleh sosok Tosca Santoso, penggagas program adopsi pohon saat bekerja di Green Radio. Peran dari GIF tersebut ialah menyalurkan bantuan-bantuan dari program CSR banyak perusahaan kepada masyarakat terutama para masyarakat sekitar hutan untuk menanam dan merawat pohon tersebut. Nantinya pohon tersebut akan ditandai dengan titik koordinat dan diberi nama adopter dari masing-masing bibit pohon. Selain itu dalam periode 3 tahun pertama, saat bibit pohon berkembang dan bertahan hidup, para adopter akan diberikan progress pertumbuhannya dalam bentuk foto dan koordinat dalam periode beberapa bulan. Dalam jangka panjang, nantinya dari hasil saving dari adopsi pohon tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk program pemberdayaan lainnya, dalam hal ini di Sarongge dibentuk suatu kelompok ternak kambing dan kelinci. Bagaimana, apakah adopsi pohon relevan untuk lahan-lahan kritis di Indonesia?



Foto: Freepik.com

Koperasi Sugih Makmur hadir untuk Sarongge

Koperasi ini merupakan koperasi yang berada di Kampung Sarongge Girang, tepatnya pada RT 01 RW 09. Terbentuknya koperasi ini diawali dengan keresahan para kelompok ternak kelinci yang dibentuk sejak tahun 2009. Secara legal pada tahun 2012, Koperasi Sugih Makmur baru mendapatkan kepastian badan hukum yang secara resmi dari pemerintah. Di tahun yang sama, saat awal mula berdiri dan datangnya Presiden Republik Indonesia ke Sarongge, Koperasi Sugih Makmur mendapat banyak bantuan dari Kementerian Koperasi.

Kepengurusan Koperasi Sugih Makmur berjumlah 162 anggota yang tak lain merupakan ex penggarap lahan di TNGGP dan warga sekitar lainnya, namun dari awal terbentuknya koperasi hinggal tahun 2014, kepengurusan didominasi oleh masyarakat penggarap secara sukarela mengelolanya. Dulunya yang dibentuk untuk mewadahi hasil ternak para kelompok ternak keliinci, namun hingga saat ini, Koperasi Sugih Makmur telah berkembang dan memiliki beberapa usaha diantaranya ialah industri rumah tangga berupa kerajinan, UKM Mart, Ekowisata dan kelompok ternak kelinci. Semua usaha yang dilakukan tidak lain untuk mensejahterakan para anggotanya. Selain itu, Saung Sarongge tempat kami menginap juga dalam kepengurusan Koperasi Sugih Makmur. Hasil-hasil kerajinan yang diproduksi oleh beberapa industri rumah tangga. Selain untuk tempat penginapan yang ditawarkan kepada para wisatawan, Saung Sarongge dulunya dimaksudkan sebagai tempat berkumpul para masyarakat Sarongge dan pengurus koperasi, dan bahkan beberapa kali telah dimanfaatkan sebagai tempat yang disewakan untuk pesta pernikahan yang terbuka baik untuk masyarakat Sarongge sendiri maupun dari luar daerah.

TRAVELOGUE

Wisata Kampung Durian Rengganis Desa Pakis: Oase Kaki Gunung Argopuro dan Dinamika Perjuangan Petani Hutan

Oleh: M. Kava Zulfikri



Foto : LATIN/Dicka Prawira

***Traveling* alam Kabupaten Jember tak melulu ke Pantai Papuma, Rembangan Hill, atau Gunung Gambir. Wisata Kampung Durian Rengganis ternyata juga menarik dikunjungi. Wisata yang terletak di kaki Gunung Argopuro Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur telah menjadi destinasi wisata andalan saat akhir pekan, utamanya pada musim durian. Tidak hanya itu, Berbagai aktivitas seru dengan pemandangan alam yang memikat membuat Wisata Kampung Durian ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga luar Jember ketika liburan tahun baru, liburan sekolah, atau liburan hari raya.**

Salah satu daya tarik wisata ini adalah kejernihan dan kesegaran air pegunungan yang mengalir di sungai kawasan tersebut. Para wisatawan dapat merasakan sensasi segarnya dengan berendam bersama keluarga. Kesegaran dan kebersihan udara di bawah pohon-pohon rindang pun tak luput memanjakan pernapasan pengunjung yang sedang duduk-duduk ngopi santai. Gemericik air sungai dan fauna di sekitar, seperti tonggeret, jangkrik, dan katak turut bersahutan menenangkan pikiran wisatawan dari penat pekerjaan. Tidak heran jika beberapa pengunjung sengaja berwisata untuk bermalas-malasan menikmati suasana asri, tenang, dan sejuk khas pedesaan di Kampung Durian.

Di sisi lain, kekayaan fauna di wisata seluas 0,8 ha ini tak jarang menjadi lintasan berburu hewan-hewan langka yang dilindungi, seperti Elang Jawa dan Elang Ular Bido yang turut beterbangan di Kawasan Wisata. Termasuk Lutung Jawa Hitam dan Emas yang sesekali

bergelantungan di pohon Rasamala dan Mahoni Tua. Tentu pemandangan langka ini terkadang berhasil memikat wisatawan dengan minat khusus sehingga memilih berpetualang dengan meneropong ekosistem keberadaan fauna yang masih terjaga.

Selain itu, Wisata Kampung Durian juga menawarkan kenyamanan berkemah ala-ala glamping atau glamor yang *Instagram-able* dan *TikTok-able* di piggiran aliran sungai. Tidak harus paket semalam, wisatawan bisa menyewa tenda glamping atau rumah segitiga minimalis dengan paket per jam yang murah meriah di siang maupun malam hari. Tidak hanya nuansa alamnya, kulineran khas Desa Pakis juga menarik dicoba. Suguhan weci, tempe kabut, tahu plontos, minuman rempah-rempah, dan kopi pahit dapat dinikmati dan disantap di kawasan yang syahdu dan dingin ini.

Sementara itu, saat musim durian tiba, pengunjung juga dapat menikmati durian lokal langsung dari Lereng Argopuro. Para maniak durian datang berwisata berulang kali hanya untuk sekedar memejamkan mata dan merasakan pulennya durian lokal kualitas super dengan berbagai varian cita rasa yang lezat dan nikmat. Ada 50 lebih jenis durian yang benar-benar nikmat untuk disantap. Saking banyaknya, warga lokal pun tak luput memberi nama durianya masing-masing, seperti durian Sultan Rengganis, Mentega Rengganis, Purba Pi'i, Si Petir, Si Emas, Si Gendon, *Milkywhite*, Sebajul, dan Sebabi. Tidak hanya itu, jenis durian yang sedang *trend* juga dapat ditemui di Wisata Kampung Durian, seperti Durian Musang King, *Blacktown*, Bawor, Tembaga dan Montong. Berbagai tekstur durian yang tebal atau tipis dengan rasa manis, legit, pahit, susu, sprit, dan segar dapat memuaskan lidah penikmat raja buah ini. Hanya dengan lima ribu rupiah per buah hingga 50 ribu per Kg, wisatawan dapat menikmati sensasi belah durian yang disukainya.

Tak melulu soal rasa, sebagian pengunjung justru menikmati pemandangan seru ketika para petani durian turun dari gunung dengan *sebajong* durian yang dibawanya menuju kawasan wisata. Para petani langsung dikerumuni pengunjung yang tak sabar menikmati durian segar masak pohon. Tawar menawar sengit serta gelak tawa dengan dialek Madura menambah kehangatan tersendiri antara wisatawan dengan petani durian, lebih-lebih jika pembeli berasal dari luar daerah yang tidak bisa bahasa Madura. *First Impression* seperti itulah yang membuat Wisata Kampung Durian Rengganis sulit dilupakan pengunjung.

Berwisata pada musim durian di Kampung Durian memang berbeda dengan hari biasa. Hampir di berbagai penjuru kawasan dipenuhi para wisatawan dengan keluarganya. Antar keluarga pun saling bertegur sapa sembari melihat tingkah lucu anak-anaknya yang berendam di sungai, sedang lainnya duduk santai di pinggir sungai. Gelak tawa anak mewarnai kehangatan keluarga. Tidak jarang juga para orang tua turut berendam menemani anak-anaknya berenang, bermain perosotan, dan saling memercikan air satu sama lain menikmati oase sungai yang bersumber dari Air Terjun Ondo Telu Rengganis.

Walaupun mewah, sejuk, dan indah ini, tahun 2025 pengunjung dikenai tiket Rp. 2500,- Per kepala. Sebelumnya pengunjung hanya cukup membayar jasa penitipan kendaraan yang amat terjangkau. Tarif kendaraan yang dipungut untuk memasuki area wisata ini adalah Rp 2500,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 3.000,- untuk kendaraan roda empat. Sungguh wisata yang sangat ramah kantong. Pada liburan tahun baru 2025, sebanyak 30.000 tiket terjual habis di Wisata Kampung Durian yang bertepatan dengan musim panen durian.. Setiap harinya jumlah wisatawan diperkirakan mencapai1000 orang. Pada liburan lebaran Idul Fitri 2025, penjualan tiket mencapai 10.000 tiket hingga kendaraan pengunjung yang terus berdatangan harus diparkir di pelataran warga sekitar sebagai alternatif ruang parkir.

Dibalik Syahdunya Wisata Kampung Durian Rengganis

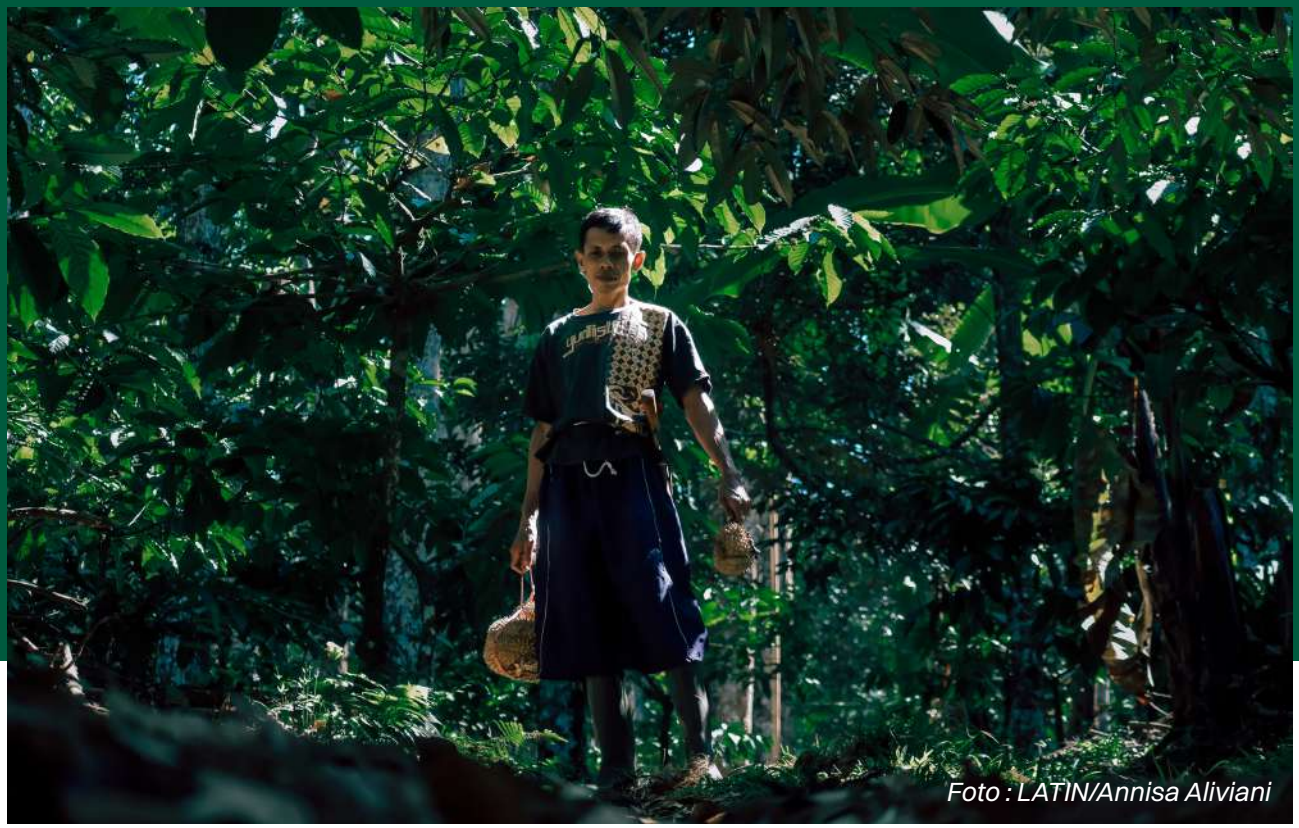


Foto : LATIN/Annisa Aliviani

Tidak melulu mengandalkan investor, Wisata Kampung Durian Rengganis dapat berkembang hingga sesyahdu ini berkat kerja bakti masyarakat yang terbiasa hidup berdampingan dengan konflik agraria, mulai dari konflik dengan Perkebunan, Kehutanan, Sosial, hingga politik lokal desa. Konflik-konflik itulah yang menjadikan Masyarakat terbiasa memperjuangkan hajatnya sendiri dan percaya diri bahwa dengan kekompakan, kebersamaan, dan militansi perjuangan, mimpi-mimpi perjuangan akan tercapai.

Dalam konteks penguasaan sumber daya agraria pada sektor wisata Kehutanan.
Wisata Kampung Durian diresmikan Bupati Jember pada 21 Maret 2019. Serangkaian acara digelar sebagai simbol lahirnya wisata baru di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang berbasis alam dan hasil hutan. Destinasi wisata seperti Air Terjun Ondo Telu Rengganis, Wisata Air, Wisata Petik Kopi, dan Wisata Petik Durian menjadi satu paket wisata bernamakan Kampung Durian. Ada sekitar 100.000 pohon durian yang ditanam di kawasan hutan masyarakat dan hutan rakyat. Tidak heran jika Kampung Durian menjadi salah satu sentral buah durian di Kabupaten Jember.

Merintis wisata tidak selamanya mulus, Wisata Kampung Durian sempat gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Semua tatanan yang telah rencanakan oleh Kelompok Petani Rengganis seperti *camping ground* tidak dapat terealisasi. Area wisata pun menjadi semak-semak belukar. Jalur menuju wisata sulit diakses, tertutup ruput liar dan *gazebo* yang dibangun pun rapuh dimakan rayap. Tersisa bunga-bunga yang tidak terawat di pinggiran Sungai dan jalan menuju wisata.

Satu tahun setelah terbitnya Keputusan Menteri terkait izin pengelolaan kemitraan kehutanan pada 30 April 2019, Wisata Kampung Durian mulai dipulihkan kembali dengan semangat gotong royong oleh anggota Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) Rengganis. Sedikitnya 30 investor lokal yang juga merupa-

kan anggota kelompok, mengumpulkan modal awal untuk memulai pemulihan kawasan wisata. Setiap investor dibatasi untuk menanamkan modal maksimal sebesar lima juta rupiah, agar tidak ada satu pihak pun yang mendominasi kepemilikan atas Kampung Durian.

Menjelang akhir tahun 2021 dan awal 2022, KPS Rengganis mulai menyusun rencana pembukaan kembali wisata tersebut. Secara perlahan, mereka membangun area *camping ground*, menata ulang batu-batu kali yang berserakan, membersihkan aliran air, merapikan taman bunga, serta memperbaiki sarana-prasarana seperti toilet dan area parkir—semuanya dilakukan secara bergotong royong dengan penuh semangat.

Puncaknya, pada 26 Februari 2022, Bupati Jember bersama Wakilnya hadir dalam acara **Sedekah Bumi dan Oksigen**, yang menjadi simbol resmi pembukaan kembali Wisata Kampung Durian sebagai destinasi andalan berbasis perhutanan sosial.

Dalam diskursus sektor kehutanan, periode itu juga bertepatan dengan ramainya pembahasan mengenai Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dengan kata lain, Wisata Kampung Durian Rengganis tegah berada di persimpangan arah. Wisata yang tengah dibangun secara swadaya oleh masyarakat ini menjadi objek tarik-menarik antara KPS Rengganis dan Perum Perhutani. Jika kawasan ini masuk ke dalam skema KHDPK, maka pengelolaan Kampung Durian sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok. Sebaliknya, jika berada di luar KHDPK, maka ruang gerak KPS Rengganis akan terbatas karena wilayah wisata tersebut masih berada dalam kawasan kerja Perhutani.

Arah masa depan Rengganis mulai terlihat lebih jelas sejak terbitnya SK 287 pada 5 April 2022, disusul keluarnya izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada 12 Juni 2023. Berdasarkan kebijakan tersebut, kawasan Kampung Durian yang berada dalam wilayah kerja KPS Rengganis secara resmi menjadi area kelola dan tanggung jawab masyarakat setempat.

Seiring itu, melalui Unit Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Kampung Durian, KPS Rengganis terus mengembangkan potensi wisata secara bertahap, mulai dari pembangunan wahana *flying fox*, pengembangan area camping ground, hingga penyediaan wisata kuliner khas Desa Pakis. Namun pada tahun 2024, wisata ini justru menghadapi konflik baru: dugaan penyerobotan pengelolaan oleh oknum pemerintah desa yang bekerja sama dengan makelar kasus. Ironisnya, pemerintah desa justru selama ini telah banyak diuntungkan dari pembangunan jalan desa hasil kontribusi wisata dan dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

Proses panjang ini sejatinya menjadi bukti bahwa petani hutan mampu mengelola hutan dan potensi wilayahnya secara mandiri. Meski membutuhkan waktu dan perjalanan yang tidak mudah, keberadaan wisata ini telah mempermudah jalur distribusi hasil hutan masyarakat. Hasil bumi Desa Pakis kini lebih cepat terserap pasar. Inilah langkah taktis yang perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan petani hutan di Indonesia

Satu tahun setelah turunnya Keputusan Menteri perihal izin kelola kemitraan kehutanan pada 30 April 2019, Wisata Kampung Durian kembali dipulihkan dengan semangat gotong royong anggota KPS (Kelompok Perhutanan Sosial) Rengganis. Setidak-tidaknya 30 orang investor lokal yang merupakan anggota KPS Rengganis mengumpulkan modal awal untuk pemulihan wisata. Investasi 30 orang tersebut, setiap orang tidaklah boleh lebih dari 5 (lima) juta, supaya tidak ada yang *overpower* atas Kampung Durian. Akhirnya, diujung tahun 2021 dan awal tahun 2022, KPS Rengganis mulai berencana membuka lagi wisata tersebut. Pelan-pelan dibangun Camping Ground, batu-batu kali yang berserakan di tata kembali, aliran air dibersihkan, bunga-bunga ditata ulang, dan sarana prasarana wisata seperti toilet dan parkiran diperbaiki dengan antusias kerja bakti. Barulah, per 26 Februari 2022, Bupati Jember dan Wakilnya membuat acara Sedekah Bumi dan Oksigen. Acara tersebut merupakan simbol dibukanya Wisata Kampung Durian siap menjadi wisata andalan rakyat berbasis perhutanan sosial.

Dalam diskursus pada Sektor Kehutanan, bulan-bulan itu merupakan bulan dimana perhutanan sosial tengah menjadi perbincangan yang hangat kaitanya dengan wacana Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Dalam kata lain, Wisata Kampung Durian Rengganis sejatinya berada di persimpangan jalan. Wisata yang tengah dibangun mas-

yarakat ini menjadi objek perebutan antara KPS Rengganis dengan Perum Perhutani. Taruhannya, jika Rengganis masuk KHDPK, maka aset Kampung Durian dikelola secara penuh oleh Kelompok. Sebalikanya, jika Kampung Durian berada diluar KHDPK, maka KPS Rengganis tidak dapat mengelola wisata dengan leluasa, lantaran Wisata Kampung Durian masuk area kerja Perum Perhutani. Masa depan rengganis mulai terlihat sejak terbitnya SK 287 (per 5 April 2022) dan izin HKm (Per 12 Juni 2023). Berdasarkan SK itu, Kampung Durian yang masuk area kerja KPS Renggan-is sepenuhnya menjadi area kelola serta tanggung jawab masyarakat rengganis. Lebih lanjut, KPS Rengganis melalu KUPS Wisata Kampung Durian semakin yakin dan pelan-pelan mengem-bangkan wisata dengan membuka wahana-wahana baru, seperti flying fox, camping ground area, dan wisata kuliner khas Desa Pakis. Hingga kemudian, tahun 2024, wisata ini dihadapkan dengan kasus makar penyerobotan kelola wisata dari Pihak Pemerintah Desa bersama makelar kasus yang membersamainya. Padahal sejauh ini, Pemerintah Desa sangat diuntungkan dengan pembangunan jalan desa dari hasil wisata Kampung Durian dan kedatangan wisatawan.

Proses panjang ini sebenarnya merupakan bagian dari bukti bahwa petani hutan mampu menge-lola hutan dan potensi yang ada. Hanya saja, memang membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Dengan adanya wisata ini, masyarakat dimudahkan dalam jual beli hasil hutan, sehingga hasil bumi yang ada di Desa Pakis cepat terserap pasar. Inilah langkah taktis yang perlu didorong sebagai upaya peningkatan kesejateraan Masyarakat petani hutan.

OVERSEAS

Refleksi Perubahan Sistem Penghidupan Orang Rimba

Oleh: Alberta



Foto : Wiro Danu

Mimbing Sunting berdiri canggung di depan loket kantor Dinas Dukcapil Merangin sembari menggenggam map plastik yang di dalamnya terselip fotokopi kartu keluarga yang baru dibuatnya. Sore itu, di bulan September 2023, ia mempersiapkan diri untuk perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya: melintasi benua, dari hutan Sumatra menuju gedung konferensi megah di Italia. Gugupnya terasa nyata, bukan karena perjalanan itu sendiri, melainkan bahasa asing yang akan mendominasi percakapan di UN Global Indigenous Youth Forum yang diselenggarakan di markas besar FAO (Food and Agriculture Organization) di kota Roma. Ia sering berkata, "Ee todo Dilla mahalo, ibo? Betuk ake hopi tokang pebasa nangoy, Berta." (Nanti Dilla ikut, kan? Aku takut karena tidak bisa bahasa Inggris). Namun, Mimbing sebenarnya membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kemampuan bahasa: cerita tentang hutan, pangan, dan perubahan mendalam yang tengah melanda Komunitasnya.

Mimbing berasal dari kelompok masyarakat adat Orang Rimba yang tinggal di kawasan hutan Makekal Hulu, di sisi barat Taman Nasional Bukit Duabelas, provinsi Jambi. Di bawah naungan rimbun pepohonan tempat ia tumbuh, sumber pangan bukan hanya tentang rasa kenyang. Mimbing mengenang saat ia menemukan pucuk-pucuk daun muda, lebah liar yang meneteskan madu, ragam jerat hewan yang ia pasang setiap sore, atau sungai yang mengalirkan ikan segar. Atau, saat ibunya memberikan bubur benor hasil galian benor (sejenis umbi-umbian hutan) saudara perempuannya di lantai hutan. Di rimba tempat tinggalnya, makanan adalah hadiah langsung dari alam, Orang Rimba hanya perlu peralatan sederhana dan fisik yang kuat untuk mencarinya.

Kini, satu tahun setelah Mimbing pulang dari Italia, sebagian Orang Rimba meninggalkan hutan dan memilih tinggal di kebun sawit warga desa untuk mengumpulkan brondol (rontokan) sawit atau mencari damar. Hasil penjualan brondol dan damar mereka kumpulkan untuk membeli makanan dan barang-barang di pasar, sesuatu yang sebelumnya tak pernah menjadi kebutuhan utama.

Hal ini merupakan imbas dari berubahnya sistem sosio-ekonomi yang menyeluruh akibat tekanan pasar global pada Orang Rimba. Iming-iming kapitalisme global memasuki wilayah hidup Orang Rimba sejak dua dekade lalu melalui rantai suplai perindustrian karet. Namun belakangan, hal itu justru memberikan buah pahit akibat jatuhnya harga getah karet yang telah mengubah lanskap hutan penghidupan mereka sebelumnya. Kini, penghidupan masyarakat adat bergantung pada remah-remah kue dari sistem pasar global tersebut, seperti brondol dan damar yang tidak seberapa.

Perubahan tersebut bukan tanpa pola. Penelitian mengenai sistem pangan tradisional yang dilakukan oleh kelompok pemuda Orang Rimba yang menamakan dirinya Kelompok Makekal Bersatu pada tahun 2020 menemukan pola konsumsi komunitas Orang Rimba yang bergeser drastis dalam dekade terakhir. Dari 80% makanan yang bersumber langsung dari hutan pada 2010-2015, angka itu turun menjadi 50% pada 2015-2020, sisanya mereka beli dari pasar desa di luar rimba. Para rerayo (tetua adat) memperkirakan tren itu akan terus turun hingga hanya 20% pada 2025. Data ini mencerminkan bukan hanya pola konsumsi yang berubah, tetapi juga runtuhnya sistem pangan tradisional yang telah menopang komunitas mereka selama berabad-abad. Terdapat dua poin SDG (Sustainable Development Goals) atau TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang berkaitan dengan refleksi perubahan pola pangan ini. Pertama, dalam bahasan SDG 2 'Tanpa Kelaparan', krisis ini bukan sekadar masalah kelaparan atau kurangnya pangan, tetapi lebih jauh tentang bagaimana sistem pangan lokal yang berkelanjutan dan kaya gizi tergerus oleh modernisasi dan kapitalisme global yang memburu efisiensi dan keuntungan. Imbas selanjutnya, beberapa penyakit baru bermunculan dalam skala yang mayor, seperti muntaber, batuk berat, maag, hingga penyakit kuning. Dampak tersebut termaktub dalam tujuan SDG 3 yang menjadi poin kedua, mengenai 'Kehidupan Sehat dan Sejahtera'. Sebagaimana prinsip SDG 'no one left behind', harapannya Orang Rimba serta masyarakat adat lainnya menjadi lebih sejahtera, sehat, mandiri atas pangan, serta berdaulat atas lahannya. Hal ini tentu dapat terwujud saat negara dapat memenuhi kewajibannya dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, salah satunya dengan berkomitmen mewujudkan SDG secara runut dan menyeluruh



LATIN/Adinda Egreina

PHOTO ESSAY

Dokumentasi CFES





Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perempuan.

Padasenang: Bertahan di Balik Sejarah Kehutanan

Oleh : Zakiy Rabbani



Desa Padasenang, di Kabupaten Sukabumi, telah menjadi rumah bagi para petani hutan selama beberapa generasi-, jauh sebelum wilayah ini resmi berstatus desa pada tahun 1980. Bagi mereka, bertani di tengah kawasan hutan bukan sekadar upayauntuk bertahan hidup, melainkan praktik sehari-hari mempertahankan hidup, tapi juga praktik harian dalam merawat hubungan dengan lahan yang secara hukum, bukan milik mereka. Di antaranya kehidupan itu, selalu ada ruang negosiasi: antara kebutuhan ekonomi dan batasan legal yang ditetapkan oleh negara.



Pengelolaan kawasan hutan telah lama berada di tangan negara, terutama sejak dengan kebijakan besar pada tahun 1978 yang mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada badan usaha milik negara. Kebijakan ini lahir dari dorongan kepentingan komersial, bukan semata-mata demi kelestarian hutan atau kesejahteraan masyarakat sekitar.Langkah ini lahir dari kepentingan komersial



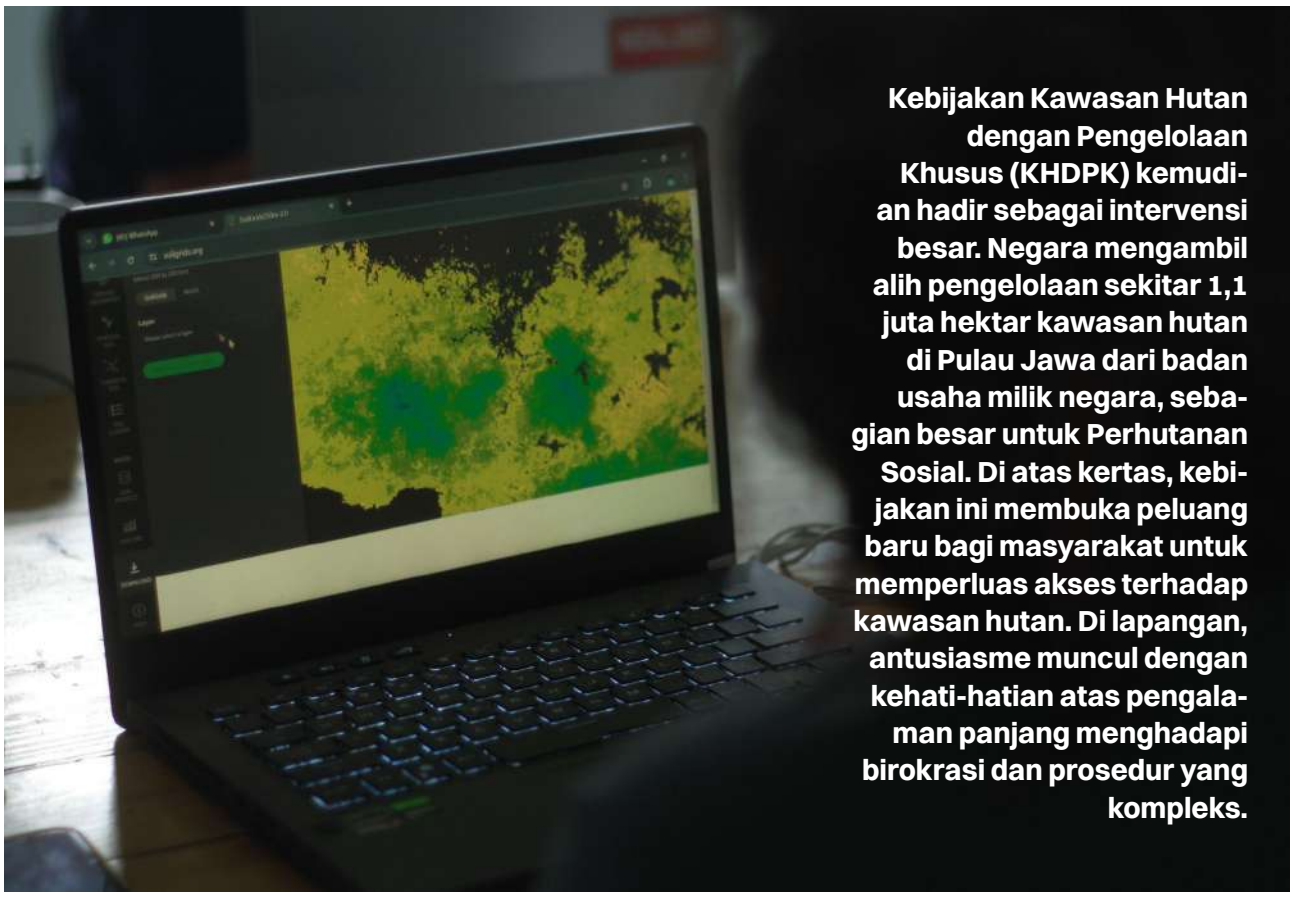
Pada praktiknya, akses petani hutan terhadap lahan yang telah mereka manfaatkan secara turun-temurun menjadi terbatas. Meskipun skema seperti Perhutanan Sosial muncul untuk menjembatani kesenjangan tersebutitu, jarak antara kebijakan di atas kertas dan realitas dan kenyataan di lapangan masih terasa lebar.



Selama beberapa dekade, klasifikasi terhadap penggunaan lahan telah mengubah lanskap di banyak tempat. Realitas lokal yang kompleks sulit berintegrasi dengan orientasi komersial pengelolaan kawasan hutan oleh badan usaha milik negara, mendorong penurunan produktivitas lahan—baik untuk petani hutan dan juga pengelola. Ketika aturan menjadi lebih ketat, pilihan petani hutan pun semakin terbatas. Lahan yang dulunya subur perlahan kehilangan daya dukungnya.



Di Padasenang, para petani hutan memilih untuk tidak hanya menunggu bantuan dari luar. Mereka membentuk ruang-ruang kolaborasi yang memungkinkan suara petani hutan tetap hadir dalam diskusi mengenai pengelolaan kawasan hutan mereka. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tani Sejati tumbuh sebagai representasi petani hutan dalam urusan garapan lahan pertanian mereka di kawasan hutan. Lembaga ini bukan hanya wadah administratif, melainkan jembatan yang melegitimasi petani hutan dihadapan pengelola.



Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) kemudian hadir sebagai intervensi besar. Negara mengambil alih pengelolaan sekitar 1,1 juta hektar kawasan hutan di Pulau Jawa dari badan usaha milik negara, sebagian besar untuk Perhutanan Sosial. Di atas kertas, kebijakan ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperluas akses terhadap kawasan hutan. Di lapangan, antusiasme muncul dengan kehati-hatian atas pengalaman panjang menghadapi birokrasi dan prosedur yang kompleks.



Inisiatif-inisiatif yang muncul dari segala keterbatasan di Padasenang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tak semata soal desain program, tapi tentang kemampuan menyerap realitas. LMDH dengan sederet kegiatannya tetap berhasil melakukan berbagai inisiatif dengan atau tanpa hadirnya implementasi kebijakan yang ada.



Bila KHDPK ingin menjadi lebih dari sekadar perubahan administrasi, maka ia harus mampu menyentuh tanah dan kehidupan yang bergantung padanya.

REVIEW

Mewujudkan Keadilan dan Kelestarian Perhutanan Sosial sebagai Paradigma Masa Depan Kehutanan Indonesia

Oleh : Daffa Ibra Danendra

Perhutanan Sosial di Indonesia merupakan pendekatan inovatif yang memadukan aspek kelestarian ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan hutan (Hardiyanti dan Aminah 2019). Sejak 25 tahun terakhir, konsep perhutanan sosial telah mengalami perkembangan signifikan, yang tak lepas dari berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang memengaruhi praktik kehutanan global (Hidayah *et al.* 2016). Pada awalnya, *Food and Agriculture Organization* (FAO) menggunakan istilah *community forestry* sebagai bentuk transformasi kehutanan yang berorientasi pada masyarakat sekitar hutan. Hal ini menandai munculnya pergeseran paradigma, dari kehutanan yang berfokus pada eksploitasi hutan untuk kepentingan negara atau korporasi menuju sistem pengelolaan yang lebih inklusif, di mana masyarakat lokal terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka (Lawasi 2023).

Dua dekade kemudian, FAO melakukan peninjauan ulang dan memperkenalkan konsep baru yaitu *community-based forestry* (CBF), atau perhutanan berbasis masyarakat. Pada konsep CBF, terdapat integrasi antara gagasan dan praktik pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat lokal dengan pengetahuan ilmiah, kebijakan, serta struktur kelembagaan yang berasal dari luar komunitas tersebut. Dengan demikian, CBF mendorong terciptanya sinergi antara pengetahuan lokal dan pendekatan ilmiah yang lebih luas (Nath *et al.* 2016). Tidak hanya itu, proses desentralisasi dan devolusi kekuasaan memberikan masyarakat lokal hak untuk mengelola hutan di wilayah mereka, sehingga tercipta keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, perjalanan panjang konsep Sosial Forestri ditandai oleh konflik yang berakar dari dominasi negara dalam penguasaan lahan hutan, yang sering kali berkonflik dengan hak tenurial masyarakat lokal dan adat (Dini *et a*l. 2023). Dominasi negara atas hutan selama bertahun-tahun telah memunculkan berbagai persoalan tenurial dan konflik lahan. Kebijakan relokasi penduduk, transmigrasi lokal, dan pemukiman masyarakat terasing menjadi sumber ketegangan yang kerap kali memutus akar kehidupan masyarakat yang telah bergantung pada hutan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, desentralisasi pengelolaan hutan menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu mengatasi persoalan konflik lahan serta memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat dari hutan di sekitarnya (Somad 2017).

Perhutanan sosial bukan hanya sekadar upaya memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga langkah konkret untuk melestarikan ekosistem hutan melalui praktik pengelolaan yang berkelanjutan menuju visi perhutanan sosial tahun 2045 (Aqilla 2024). Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) sebagai lembaga non-pemerintah menyebutkan bahwa perhutanan sosial seharusnya menjadi paradigma fundamental dalam kehutanan Indonesia, bukan sekadar proyek jangka pendek. Melalui kondisi tersebut, perhutanan sosial dapat menjadi landasan untuk menciptakan harmonisasi antara masyarakat adat maupun lokal dengan alam, serta menjadi kunci bagi pembangunan peradaban dan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tantangan krisis dan ketidakpastian global di masa mendatang.

Dalam pendekatan skema perhutanan sosial, LATIN menggunakan konsep TIVaR sebagai instrumen penting. Konsep tersebut mencakup empat dimensi utama diantaranya adalah *Tenure security* (jaminan tenurial), *Intersubjects relation* (relasi antar subjek), *Values creation* (penciptaan nilai-nilai perhutanan sosial), dan *Responses to change* (tanggapan terhadap perubahan). *Tenure security*, atau jaminan tenurial, mencakup aspek politik, hukum, dan institusional yang memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengakses dan mengelola kawasan

hutan (Larson *et al*. 2023). Selain itu, relasi antar subjek dalam perhutanan sosial mencerminkan hubungan yang terbentuk antara pemangku kepentingan, baik kolaboratif, kompetitif, maupun konflik. Hubungan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan serta praktik perhutanan sosial di lapangan.

Pada aspek penciptaan nilai *(values creation)*, perhutanan sosial memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Aktivitas yang berlangsung dalam kerangka perhutanan sosial diarahkan untuk menciptakan nilai-nilai positif dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Pada tingkat pemangku kebijakan, pemerintah menganggap perhutanan sosial sebagai program strategis yang berkontribusi pada keadilan agraria serta pemerataan ekonomi berbasis hutan. Kondisi lain menunjukkan bahwa respons terhadap perubahan mencerminkan tingkat resiliensi masyarakat, khususnya petani hutan, dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin terjadi. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, baik pada tingkat lokal maupun global, menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan perhutanan sosial di masa mendatang.

Sejarah menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan hingga Orde Baru, hutan telah menjadi sumber devisa bagi negara (Nakita dan Najicha 2022). Namun, kondisi eksploitasinya sering kali mengesampingkan hak masyarakat lokal dan adat. Konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal sering terjadi akibat kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Fenomena tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial politik, termasuk kemiskinan dan gangguan terhadap tatanan sosial masyarakat adat. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah yang tidak inklusif sering kali mengakibatkan masyarakat adat kehilangan akses terhadap hutan yang menjadi bagian integral dari kehidupannya (Wulandari dan Kusuma 2024).

Realita menunjukkan bahwa melalui skema perhutanan sosial, pemerintah mencoba mengembalikan sebagian hak pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal. Hingga Agustus 2022, pemerintah telah menetapkan luas hutan untuk perhutanan sosial sekitar 5,03 juta hektar. Skema yang digunakan meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian konflik kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat serta masyarakat lokal.

Skema perhutanan sosial dapat menjadi paradigma kehutanan Indonesia tahun 2045 yang tidak hanya berfokus pada sektor kehutanan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kebudayaan dan ketangguhan bangsa. Menuju tahun 2045, perhutanan sosial tidak boleh hanya dianggap sebagai proyek sektoral, tetapi harus dilihat sebagai upaya jangka panjang yang mampu menguatkan peradaban Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Untuk mencapai visi ini, perhutanan sosial harus didukung oleh ekosistem yang mendorong kreativitas dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat (Rahman *et al*. 2021).

Namun, implementasi perhutanan sosial di lapangan tidak selalu mudah. Beragam kepentingan, nilai, dan aspirasi dari berbagai aktor, mulai dari pemerintah, pegiat konservasi, komunitas lokal, hingga sektor bisnis, sering kali menciptakan perbedaan pandangan dan tantangan dalam penerapannya. Perbedaan perspektif ini, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan perhutanan sosial yang ideal. Selain itu, kolaborasi dan dialog antar aktor masih perlu ditingkatkan agar perhutanan sosial dapat lebih efisien dan efektif dalam menyerap berbagai kepentingan, nilai, dan aspirasi yang ada.

Sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan ini, upaya mencapai perhutanan sosial 2045 ditempuh melalui tiga misi utama. Pertama, desentralisasi pengelolaan perhutanan sosial Indonesia yang meneguhkan demokratisasi, kelestarian, dan kesejahteraan. Desentralisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran dan posisi masyarakat di tingkat lokal, seperti desa dan komunitas adat. Kedua, ketangguhan agraria keluarga petani berbasis keadilan tenurial, teknologi, dan ramah lingkungan. Keluarga petani sebagai unit sosial ekonomi yang mendasar harus dilibatkan secara aktif agar perhutanan sosial dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Ketiga, menciptakan atmosfer pembelajaran yang inklusif dan kreatif bagi semua aktor perhutanan sosial.

LATIN sebagai lembaga non-pemerintah menyoroti pentingnya relasi antar-subyek perhutanan sosial pada lintas sektor dan generasi. Relasi tersebut akan memperkuat diskursus perhutanan sosial sebagai paradigma masa depan Indonesia. Ekosistem perhutanan sosial harus mampu memfasilitasi tumbuhnya aksi kolektif yang mendorong perubahan paradigma kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan. Keterhubungan para aktor lintas sektor dan generasi juga diharapkan akan menghasilkan pengetahuan dan gagasan progresif yang mendorong perhutanan sosial menjadi landasan pembangunan yang kokoh di masa mendatang (Yunanto 2020; Siregar 2022).

Untuk memastikan keberlanjutan perhutanan sosial di tengah berbagai perubahan, ekosistem perhutanan sosial harus mampu beradaptasi dan menanggapi perubahan di berbagai tingkat. Kemampuan beradaptasi tersebut bergantung pada kreativitas dan keinginan untuk terus belajar dari semua pihak yang terlibat. Dengan dukungan teknologi, kebijakan, serta sinergi antar aktor, perhutanan sosial dapat tetap relevan dan berkelanjutan.

Sebagai langkah konkret menuju visi 2045, LATIN merekomendasikan pembentukan sebuah institusi nasional khusus yang menangani perhutanan sosial di Indonesia. Institusi tersebut diharapkan berada langsung di bawah presiden agar terhindar dari kepentingan sektoral dan dapat menjadi motor utama dalam menciptakan paradigma kehutanan Indonesia yang berlandaskan ekosistem pembelajaran dan kreativitas. Dengan dukungan institusi yang kuat, perhutanan sosial akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kondisi hutan di Indonesia.



Foto : Juliadin kuswara

DAFTAR PUSTAKA

Dini, A., Setiawan, B., Ali, Y., Harpendya, G., & Munawaroh, F. (2023). Peran Pemerintah Provinsi Riau dalam Penanganan Konflik Tenurial sebagai Upaya Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Pandemi. *Riau Journal of Empowerment, 6*(2), 99-113.

Hardiyanti, M., & Aminah, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Pulau Jawa. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 135-152.

Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial ekologi pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 4*(3), 249-56.

Larson, A. M., Monterroso, I., Liswanti, N., & Tamara, A. (2023). What is forest tenure (in) security? Insights from participatory perspective analysis. *Forest Policy and Economics, 147*, 102880.

Lawasi, M. A. (2023). MENGKONSTRUKSI STANDARISASI COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT (CBFM) YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN. STANDAR: *Better Standard Better Living, 2(*6).

Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh deforestasi dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 6*(1), 92-103.

Nath, T. K., Jashimuddin, M., & Inoue, M. (2016). *Community-based forest management (CBFM) in Bangladesh* (Vol. 22). Switzerland: Springer.

Siregar, F. Y. D. (2022). Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4*(3), 1423-1431.

Wulandari, E., & Kusuma, A. F. (2024). PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN INKLUSIF MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PRAKTIK EMPIRIS DARI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) SISIMENI SANAM. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik, 5*(1), 1-12.

Yunanto, M. K. (2020). Kerusakan Lingkungan Dan Globalisasi: Studi Kritis Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi, 7*(2), 182-196.

Misteri Tersembunyi di Balik Peninggalan Kearifan Lokal Perbatasan Pulau Jawa

Oleh : Siti Ariayu Putri Karonsih

Judul buku	: Sukuh, Misteri Portal Kuno di Gunung Lawu
Penulis	: Rizki Ridyasmara
Penerbit	: Grasindo
Tahun terbit	: April 2016
Jumlah halaman	: 358



Foto : //id.wikipedia.org/

Candi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam bentuk arsitektur. Candi tersebar di wilayah indonesia khususnya daerah pulau jawa. Rizki ridyasmara, seorang wartawan, analis media sekaligus penulis menjadikan candi sukuh, yang terletak di lereng barat gunung lawu di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur Kabupaten Karanganyar, sebagai latar novel nya yang berjudul **Sukuh, Misteri Portal Kuno di Gunung Lawu.**

Mengambil sudut pandang seorang ahli simbol amerika bernama doktor john grant yang mendengar kabar kematian sahabat nya, profesor sjoemandirgo. sebelum kematiannya, ia menitipkan flashdisk yang berisi hasil risetnya untuk doktor john grant. Hasil riset tersebut adalah sebuah koordinat yang menunjukan piramida tersembunyi di candi sukuh.

Faktanya, pada tahun 1995 NASA mendeteksi keberadaan sebuah sinar putih misterius yang memancar dari wilayah gunung lawu hingga jauh ke luar angkasa. setahun kemudian, NASA mengerahkan puluhan ahli dari berbagai negara untuk melakukan penelitian di beberapa titik di selatan jawa tengah. namun, hingga kini sinar itu masih menjadi misteri. dan koordinat hasil riset profesor sjoemandirgo adalah koordinat tempat sinar itu memancar. mengetahui itu, doktor john grant bersama tim nya yang lain langsung berangkat ke karanganyar untuk meneliti hal ini. mereka memutuskan meneliti dua dari empat situs purba di daerah sukuh, yaitu candi sukuh dan candi cetho. doktor john grant beserta tim nya menemukan banyak fakta-fakta yang mencengangkan tentang candi-candi ini. seperti posisi candi yang benar-benar menghadap ka'bah. teknologi apa yang dipakai leluhur bangsa indonesia di era yang masih begitu muda hingga mampu menentukan posisi sebuah candi dengan akurat?

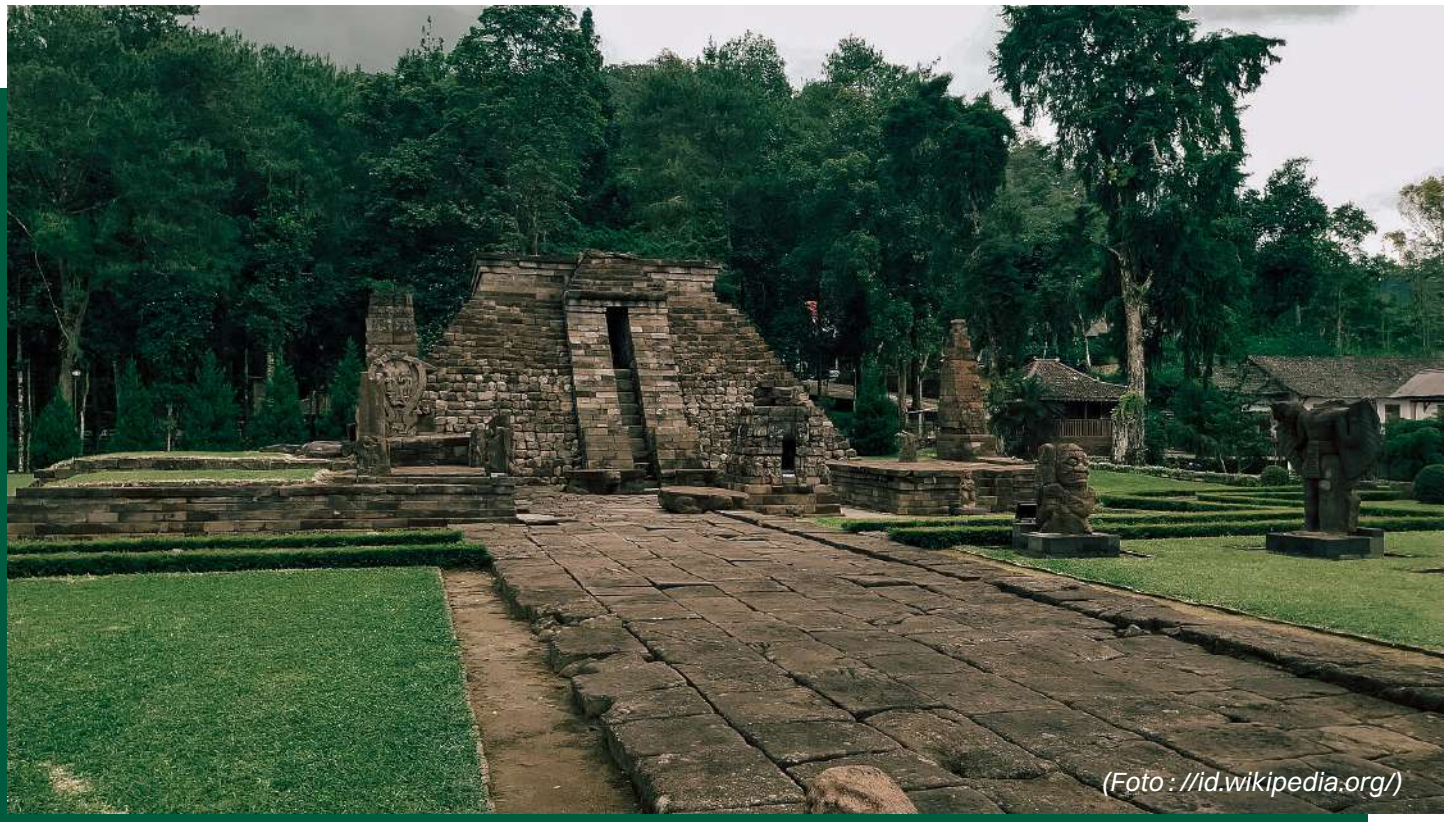
Di relief-relief pada candi sukuh bahkan menunjukan bahwa dulu nya bangsa cina, bangsa kamboja, hingga bangsa peradaban tertua di dunia yaitu sumeria menyembah kepada leluhur kita. Sedangkan relief pada Candi Cheto menggambarkan hubungan manusia dengan kesuburan, penciptaan, dan spiritualitas. Perjalanan doktor grant beserta tim nya menguak fakta-fakta yang mungkin tidak diketahui sebagian orang, bahkan oleh generasi muda kita tentang salah satu peninggalan tertua dari era Hindu-Buddha.

Novel ini menyajikan fakta lengkap beserta ilustrasi dan sumber nya yang di balut dengan lika-liku konflik cerita. Melalui sumber yang dicantumkan buku ini kita dapat menelusuri sendiri di internet dan lebih mengenal tentang arsitektur peninggalan kearifan lokal Candi Sukuh.

Cara sang penulis meramu serta meleburkan cerita dan fakta mampu menyihir pembaca masuk ke dalam cerita. sumber-sumber yang menjadi bukti setiap fakta dalam buku ini semakin meyakinkan pembaca akan kebenaran setiap konspirasi yang menjadi konflik buku ini.

Rizki Ridyasmara sukses membuat siapa saja yang membaca buku-nya ini semakin mengenal candi sukuh sebagai salah satu peninggalan kearifan lokal di tanah jawa yang begitu misterius. disamping itu, ia juga menunjukan keotentikan candi sukuh dan candi cetho yang tak dapat ditemukan di candi lain. terutama cara rizki ridyasmara menggambarkan relief-relief candi lengkap dengan ilustrasi dan penjelasan makna-makna dibalik relief tersebut. namun, sayang nya cerita yang seharus nya menjadi pondasi buku ini lama kelamaan seperti berubah menjadi pelengkap tambahan saja. cerita yang kurang berbobot tidak bisa mengimbangi fakta yang semakin kompleks. mungkin jika penulis dapat memyeimbangkan perhatian nya kepada alur cerita sedikit saja, buku ini akan lebih berkesan di hati pembaca nya.

Kesimpulannya, Novel Sukuh, Misteri Portal Kuno di Gunung Lawu ini sangat sarat ilmu pengetahuan, siapapun yang membacanya akan berdecak tidak percaya namun akan bergeming juga saat melihat sumber yang dicantumkan. buku ini sangat direkomendasikan kepada mereka yang suka berkonspirasi, dan haus fakta akan tanah leluhurnya.



(Foto : //id.wikipedia.org/)

Tentang Penulis

Siti Ariayu Putri Karonsih lahir pada 9 april 2007, Bogor, Jawa Barat. Pelajar kelas dua belas bersekolah di Madrasah Aliyah, Bojong Gede, Bogor. Gemar membaca tentang tanah air nya namun hanya dalam bentuk novel. Seorang bungsu dari lima bersaudara ini selalu bermimpi terbang bebas dari segala sesuatu yang ditakdirkan ada padanya. Namun ia merasa dirinya hanyalah burung dalam sangkar dan takdir adalah sangkar itu sendiri.

ENSIKLOPEDIA

Kamus Hidup Kehutanan Sosial dan Budaya Hutan

Rubrik ini menyajikan istilah-istilah penting, tokoh, konsep, hingga pendekatan yang menjadi pondasi pemahaman terhadap isu kehutanan sosial, keadilan ekologis, serta budaya masyarakat adat dan lokal yang hidup berdampingan dengan hutan. Rubrik ini bukan hanya memuat definisi, namun juga narasi ringkas dan kontekstual yang membantu pembaca memperluas perspektif mereka dalam memahami dunia kehutanan dari sudut pandang komunitas.

Edisi Gerak Baru:

1. **Komuniti Forestri (Community Forestry)**
   Sebuah pendekatan pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Komuniti forestri mengedepankan nilai keadilan,kedaulatan pengelolaan, dan pengetahuan lokal. Praktik ini telah dijalankan secara turun-temurun jauh sebelum istilahnya dikembangkan dalam kebijakan modern.

2. **Perhutanan Sosial**
   Program negara yang memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara. Perhutanan sosial mencakup skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

3. **Ekonomi Pancasila**
   Prinsip ekonomi yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029, dengan nilai dasar religius, kebersamaan, egaliter, dan berkeadilan sosial. Dalam sektor kehutanan, pendekatan ini diharapkan menjembatani ketimpangan dan menjawab paradoks kemiskinan di tengah kekayaan sumber daya.

4. **Imbal Jasa Lingkungan (Payment for Ecosystem Services / PES)**
   Skema insentif kepada masyarakat atas keberhasilan mereka menjaga dan memulihkan fungsi ekologis hutan. Contohnya dilakukan oleh LPHD Desa Durian Rambun bersama CFES.

5. **KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)**
   Unit usaha yang dibentuk oleh kelompok perhutanan sosial sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. KUPS menjadi salah satu indikator kinerja implementasi Perhutanan Sosial.

6. **Adopsi Pohon**
   Model kolaboratif antara masyarakat dan pihak luar (individu/korporasi) dalam pemulihan lahan kritis. Contohnya sukses diterapkan di Sarongge dengan dukungan Green Radio dan GIF.

7. **KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus)**
   Skema baru yang memungkinkan pengelolaan hutan oleh masyarakat, terutama di wilayah bekas Perhutani. Namun, implementasinya menimbulkan tarik-menarik kepentingan seperti di Rengganis, Jember.

8. **Hutan Rakyat**
   Hutan yang berada di lahan milik masyarakat dan dikelola secara mandiri. Hutan rakyat menyumbang hampir separuh kebutuhan kayu nasional dan mencerminkan potensi besar di luar kawasan hutan negara.

9. **Rimba Sebagai Ruang Hidup**
   Dalam pandangan Orang Rimba dan masyarakat adat lainnya, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi ruang spiritual, sumber pangan, dan identitas budaya. Perubahan pola konsumsi menjadi indikator awal tergerusnya tatanan ini oleh pasar global.

10. **Wana Kayana Sembada**
    Visi kehutanan 2045 yang dicita-citakan LATIN: hutan yang kaya, rakyat yang makmur, desa yang mandiri dan tangguh.

ADVETORIAL

Kanaya Fund:
Bukti Nyata Hutan Bisa Pulih Lewat Aksi Bersama

Perjalanan restorasi hutan di Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, merupakan sebuah kisah yang menggambarkan sinergi antara kearifan lokal dan inisiatif modern dalam usaha pemulihan lingkungan. Desa Gambuhan yang terletak di Kabupaten Pemalang menjadi lokasi awal program restorasi yang diinisiasi oleh Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan PT Jejak Enviro Teknologi yang bertajuk ***"Kanaya Fund"***. Perjalanan ini dimulai dengan kunjungan langsung ke desa dan pertemuan bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Gandrung, penerima izin PerhutanSosial di kawasan tersebut.

Desa Gambuhan sendiri menghadapi tantangan serius berupa kekeringan yang diduga terjadi akibat penurunan tutupan hutan di wilayah tersebut. Menyadari pentingnya peran hutan dalam menjaga keseimbangan air dan kesuburan tanah, KTH Wana Gandrung melakukan inisiatif lokal berupa penanaman pohon di sekitar mata air. Aksi ini menjadi titik awal dari gerakan restorasi hutan berbasis komunitas yang kemudian diperkuat melalui kolaborasi lebih jauh melalui program Kanaya Fund.

Kanaya Fund hadir sebagai bentuk dukungan konkret terhadap aksi pemulihan ekosistem di Desa Gambuhan. Program ini dilaksanakan dengan melakukan penanaman sebanyak 14.500 pohon yang tersebar di area perlindungan dan area pemanfaatan hutan. Penanaman yang dilakukan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hasil hutan yang dapat dimanfaatkan dan lebih dari itu demi mendukung keberlanjutan ekosistem hutan.

Nilai-nilai lokal turut menjadi bagian penting dalam perjalanan restorasi ini. Masyarakat Desa Gambuhan, seperti diungkapkan oleh Wawan, Ketua KTH Wana Gandrung, telah lama hidup berdampingan dengan hutan dan menjunjung tinggi falsafah Jawa "Memayu Hayuning Bawana", yang berarti menjaga keindahan dan keharmonisan dunia. Falsafah ini tidak hanya bermakna spiritual, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral dan budaya bagi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nilai tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan program Kanaya Fund yang menunjukkan bahwa dukungan eksternal akan lebih efektif jika berpijak pada kearifan lokal dan memperkuat kelembagaan masyarakat yang sudah ada. Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif menjadi kunci utama keberlanjutan program.

Perjalanan restorasi hutan di Desa Gambuhan melalui program Kanaya Fund dapat menjadi model inspiratif bagi lokasi-lokasi lain di Indonesia. Ketika masyarakat, lembaga swadaya, dan teknologi bersatu dalam visi yang sama untuk menjaga alam, maka keberlanjutan lingkungan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Program Kanaya Fund di Desa Gambuhan telah menunjukkan bahwa menjaga alam tidak hanya tentang tanggung jawab, tetapi juga merupakan wujud cinta dalam memelihara kehidupan.



Foto : Raffi Ryan Akbar